

Tiga Perguruan Tinggi Muhammadiyah Ditutup

JOGJA - PP Muhammadiyah sedang diuji. Cobaan itu datang terkait dengan Perguruan Tinggi (PT) yang ada di bawah amal usahanya ikut dibekukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Dari 243 PT yang dibekukan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, tiga di antaranya adalah PT Muhammadiyah. Ke-3 PT tersebut, antara lain Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Karawang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap Jateng, dan STIKES Muhammadiyah Sidrap, Sulawesi Selatan.

"Memang betul ada tiga perguruan tinggi Muhammadiyah yang ikut ditutup pemerintah," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir kepada wartawan usai memberikan kuliah umum mahasiswa Pascasarjana UMY, kemarin (3/10).

Menurut Haedar, tiga PT Muhammadiyah yang ditutup oleh pemerintah memang sedang bermasalah. Namun, masalah yang dialami berbeda-beda. Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Karawang sudah

lama tidak beroperasi. Sejak beberapa tahun kampus ini tidak ada aktivitas belajar mengajar, menerima mahasiswa baru, dan wisuda tetapi ternyata masih tercatat di Kopertis Jawa Barat.

Sedangkan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Cilacap Jateng ikut ditutup karena terlambat mengurus administrasi sesuai intruksi pemerintah. Keterlambatan ini muncul, karena SDM kurang memadai dan luput dari perhatian PP Muhammadiyah. "STIKES Muhammadiyah Sidrap, Sulawesi Selatan dibekukan karena memang kekurangan tenaga pengajar atau dosen," tandas dosen UMY ini.

Haedar menegaskan, PT berbadan hukum PP Muhammadiyah yang ditutup pemerintah bukan karena jual beli ijazah. Karena itu, PP Muhammadiyah masih berniat akan memperbaiki tiga kampus supaya dapat beroperasi. Sejumlah solusi juga sedang disiapkan, seperti menambah tenaga dosen, pegawai, dan melengkapi administrasi sesuai yang diharapkan

pemerintah.

"Kami tegaskan di kampus Muhammadiyah tidak ada jual beli ijazah dan ijazah abal-abal. Kalau itu terjadi, PP Muhammadiyah sudah menutup lama perguruan tinggi tersebut," ungkap Haedar.

Meski PT Muhammadiyah ikut dibekukan, Haedar tetap mengapresiasi langkah pemerintah yang menertibkan PT swasta. Menurutnya, langkah ini menjadi pembelajaran bagi pengelola PT swasta di Indonesia. Namun, ia mengingatkan supaya pemerintah tidak mengobral izin pendirian PT baru di Indonesia.

"Pemerintah jangan obral pendirian perguruan tinggi yang murah meriah, karena ada tekanan dari kelompok atau parpol yang menjadikannya menteri. Pemerintah juga jangan membedakan antara perguruan tinggi swasta ataupun negeri. Sebab, tujuan perguruan tinggi sama, yaitu mencerdaskan rakyat adalah tanggung jawab pemerintah seutuhnya sesuai dengan konstitusi," ungkap Haedar. (mar/jko/ga)